

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan tahunan merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak diluar perusahaan serta mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan *stakeholders*. Kewajiban atas penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten, serta surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Namun, pada kenyataannya seringkali perusahaan tidak hanya mengungkapkan apa yang diwajibkan oleh peraturan. Perusahaan juga menyampaikan informasi lain diluar yang diwajibkan atau biasa disebut sebagai pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut (Almilia & Retrinasari 2007).

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang ketat, perusahaan diharapkan menjadi lebih transparan dalam mengungkapkan informasi laporan keuangan dan laporan insidental yang terjadi pada periode berjalan, sehingga para pemegang kepentingan dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, serta untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang akan berdampak pada aktivitas operasional perusahaan di kemudian hari.

Penelitian tentang kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan dan faktor- faktor yang mempengaruhinya merupakan hal yang penting dilakukan. Pengungkapan tersebut akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kelengkapan pengungkapan antar perusahaan, serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan. Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditor dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya.

Apabila perusahaan mengungkapkan laporan keuangannya secara sukarela, selain yang diwajibkan maka manfaat yang akan diperoleh perusahaan adalah meningkatkan nilai lebih bagi perusahaan tersebut berupa tersedianya informasi yang akurat dan memadai, sehingga para investor lebih memiliki kepercayaan terhadap pasar modal dan dapat meningkatkan jumlah investor di pasar. Pengungkapan dalam pelaporan keuangan mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan investasi, melalui pengungkapan sukarela ini yaitu informasi lebih yang dibutuhkan dari sekedar pengungkapan informasi keuangan yang diwajibkan dapat membuat investor lebih rasional di dalam mengambil keputusan-keputusan investasi karena investor lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut.

Terdapat fenomena tentang tidak transparannya laporan *Extractive Industry Transparency Initiative* (EITI) menyampaikan laporan rekonsiliasi penerimaan negara dari industri minyak dan gas (migas) serta mineral dan batubara (minerba) untuk periode 2012-2013. Terdapat juga 11 dari 174 perusahaan di sektor minyak dan gas (migas) yang juga belum melengkapi laporan EITI. Bagi perusahaan yang belum lapor EITI akan berpotensi menimbulkan citra buruk bagi transparansi dan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. EITI merupakan standar internasional dalam pelaporan penerimaan negara dari industri ekstraktif yang prosesnya melibatkan multipihak yang terdiri atas pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil dan telah diterapkan di 46 negara. Pelaksanaan EITI di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi

Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Nilai penerimaan yang tidak dilaporkan mencapai Rp 3,017 triliun, dihitung dari pajak korporasi dan dividen 10 perusahaan migas sebesar Rp 1,73 triliun. Serta dari royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) 21 perusahaan minerba senilai Rp 1,28 triliun. Keanggotaan Indonesia sebagai negara pelaksana EITI sempat dibekukan (*suspend*) sejak Februari lalu (Safrezi Fitra, 2015). Maka dengan tidak diungkapkannya data pembayaran dalam laporan keuangan perusahaan ini menunjukkan lemahnya komitmen dan keseriusan perusahaan untuk berlaku transparan dan juga lemahnya tata kelola perusahaan industri ekstraktif. Sampai saat ini belum ada sanksi bagi perusahaan migas dan minerba yang tidak menyerahkan laporannya karena masih bersifat sukarela. Fenomena ini bertentangan dengan teori *Stakeholder* yang menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya perusahaan sangat bergantung kepada kemampuannya memenuhi kepentingan para *stakeholder* perusahaan. Jika perusahaan mampu maka bakal meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar (Lako 2011, hlm.5). Tetapi dengan tidak transparannya pelaporan EITI sejumlah perusahaan pertambangan ini maka sangat merugikan pihak *stakeholder* terutama pihak pemerintah, karena berkaitan dengan penerimaan pendapatan negara yang tidak transparan dan karena tidak transparan tersebut keanggotaan Indonesia sebagai anggota EITI tertahan (*suspend*).

Walaupun laporan ini masih bersifat sukarela tetapi apabila sejumlah perusahaan ini transparan di dalam penyampaiannya, maka akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan tersebut karena akan memberikan *good news* bagi para investor yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi di perusahaan tersebut, sehingga tidak adanya informasi yang ditutupi dan akan membuat investor lebih rasional di dalam pengambilan keputusannya.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas untuk memperkuat kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan untuk itu penulis melakukan penelitian kembali walaupun penelitian tersebut telah banyak dilakukan di berbagai negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di luar negeri telah dilakukan Baroko & Hancock (2006). Sedangkan di dalam negeri dilakukan

diantaranya oleh Hardiningsih (2008) , Yunita (2012) , Suta & Laksito (2012) , dan Purwanto & Wikartika (2014).

Perusahaan yang *profitable* akan memberi sinyal kepada investor luar seperti kepemilikan yang dimiliki oleh intitusi seperti bank, pemerintah, perusahaan investasi dan institusi lain, agar menanamkan modal di perusahaan tersebut, kepemilikan institusional di anggap mampu memonitor manajemen dengan pengawasan terhadap kinerja dan menekan manajemen untuk mengoptimalkan modal yang ada untuk mendapat laba yang tinggi. Penelitian Baroko & Hancock (2006) dan Rouf & Harun (2011) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*.

Profitabilitas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio ini juga sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Hardiningsih (2008) melakukan penelitian terhadap profitabilitas dimana hasil penelitiannya menghasilkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*, sedangkan penelitian Haryanto & Yunita (2008) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *Voluntary Disclosure*, dan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto & Wikartika (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Voluntary Disclosure*.

Leverage yang diukur dengan *debt to equity ratio* yaitu untuk menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Perusahaan yang mempunyai tingkat *Leverage* yang tinggi akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan, karena tambahan informasi tersebut dibutuhkan untuk meyakinkan para kreditur bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. Penelitian Mujiyono & Nany (2010) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*, sedangkan penelitian Suta & Laksito (2012) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Voluntary Disclosure*, dan penelitian Hardiningsih

(2008) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Voluntary Disclosure*.

Penelitian ini mereplika dari penelitian sebelumnya yaitu Hardiningsih (2008) sebagai dasar acuan penelitian ini. Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2005 sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI dengan menggunakan data panel (*pooled regression*) dalam penelitiannya.

Perbedaan selanjutnya penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI. Pemilihan sampel ini berdasarkan fenomena yang terkait *Voluntary Disclosure*. Apabila suatu perusahaan melakukan pengungkapan yang luas maka akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan tersebut dan membuat investor tertarik untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure*?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* ?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Voluntary Disclosure* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah :

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap *Voluntary Disclosure* ?
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Voluntary Disclosure* ?

- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Voluntary Disclosure* ?

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup konkret tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Sebagai motivasi perusahaan dalam memberikan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan yang lengkap, jelas, rinci dan relevan sehingga dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaan.

2) Bagi Investor

Sebagai bahan pertimbangan para investor yang ingin menanamkan modal pada perusahaan sehingga mengetahui hal apa yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan tahunan untuk mengambil keputusan investasi.